

Manual Panduan Plan Vivo:

untuk Merancang dan Menerapkan Program Pembayaran
untuk Jasa Ekosistem dengan Proyek Plan Vivo
Masyarakat Pedesaan

Diperbarui Februari 2012

Hak cipta dilindungi undang-undang. Materi ini tidak diizinkan untuk direproduksi, ditampilkan, dimodifikasi, atau didistribusikan tanpa izin tertulis dari Plan Vivo Foundation.

Ucapan Terima Kasih

Pengembangan Standar Plan Vivo didorong oleh kebutuhan dan prioritas para pemangku kepentingan Plan Vivo dan masukan dari semua koordinator, pengembang, dan pendukung proyek Plan Vivo menjadi pendorong pengembangan standar ini.

Plan Vivo Foundation sangat berterima kasih atas dukungan dari Waterloo Foundation pada masa pengembangan versi Standar Plan Vivo ini dan atas prosedur serta arahan dukungan yang disediakan. Plan Vivo Foundation juga berterima kasih kepada Proyek Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan di Kalimantan (Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo – ADB TA 8331 INO) atas dukungannya dalam menerjemahkan materi ini ke dalam versi Bahasa Indonesia.

the waterloofoundation*



Kontrol versi

Manual ini menggantikan semua dokumen prosedur sebelumnya terkait dengan Standar Plan Vivo.

Penggunaan manual ini

Manual ini merupakan panduan untuk mengembangkan proyek Plan Vivo. Manual ini dirancang sebagai pelengkap Standar Plan Vivo dan harus dibaca bersama dengan Standar jika proyek berusaha teregistrasi oleh Plan Vivo. Catatan: Dari waktu ke waktu, Plan Vivo Foundation dapat memperbarui manual ini. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru.

Jika Anda tertarik untuk mengembangkan proyek Plan Vivo atau kegiatan Anda sekarang memenuhi persyaratan registrasi, silakan hubungi Plan Vivo Foundation.

Standar Plan Vivo dan materi pendukungnya dapat diakses melalui situs (www.planvivo.org) atau dengan menghubungi Plan Vivo Foundation:

info@planvivofoundation.org

Tel: +44 (0)131 243 2782



Plan Vivo Foundation adalah badan amal terdaftar di Skotlandia, nomor SC040151

Daftar Isi

Daftar Isi	3
1 Pendahuluan: Tinjauan Umum Plan Vivo dan PES.....	4
1.1 Skema Pembayaran Jasa ekosistem	5
Fitur penting kesepakatan PES adalah:	5
1.2 Kenapa Karbon? Menggunakan karbon sebagai metrik untuk PES.....	6
Tabel 1: Elemen dan variasi umum dalam proyek Plan Vivo	7
2 Mengkoordinasikan proyek Plan Vivo (kerangka kerja kelembagaan) .	8
2.1 Koordinator proyek.....	8
2.2 Bagaimana pejabat pemerintah dapat terlibat?	9
2.3 Mencari bantuan eksternal.....	9
3 Mengidentifikasi dan melibatkan masyarakat target	11
3.1 Menetapkan penguasaan lahan	12
3.2 Menjelaskan Plan Vivo dan PES kepada masyarakat	12
3.3 Melibatkan dan menginformasikan pemangku kepentingan lain (nonpeserta)	13
4 Memilih dan merancang kegiatan proyek.....	15
4.1 Pemilihan spesies.....	16
5 Pemilihan lokasi.....	18
5.1 Berapa banyak lokasi?	18
5.2 Menetapkan kriteria pemilihan lokasi	18
6 Plan Vivo: Membuat dan mengevaluasi rencana pengelolaan lahan ..	21
6.1 Cara membuat plan vivo	21
6.2 Mengevaluasi plan vivo	22
7 Mengembangkan Mekanisme Pembayaran	24
7.1 Persyaratan kelembagaan: dana Plan Vivo.....	24
7.2 Prinsip pembagian manfaat.....	25
7.3 Berapa harga yang seharusnya diterima masyarakat untuk satu ton CO ₂ ?	26
7.4 Kesepakatan PES (membuat kontrak untuk jasa ekosistem)	27
7.5 Apakah pemicu penandatanganan kesepakatan PES?	27
8 Manajemen informasi	29
9 Memantau dampak selain karbon.....	30
9.1 Memantau dampak ekosistem	30
9.2 Melibatkan masyarakat dalam pemantauan	31
LAMPIRAN 1: CONTOH KESEPAKATAN PES	32
Daftar Istilah	33



1 Pendahuluan: Tinjauan Umum Plan Vivo dan PES

Plan Vivo adalah dukungan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mengelola lahan secara berkelanjutan dan memulihkan ekosistem lokal mereka. Ini merupakan metode untuk mengembangkan dan membuat sertifikasi proyek penggunaan lahan dengan melaksanakan pembayaran untuk Jasa ekosistem (Payment for Ecosystem Services/PES) kepada masyarakat. Kegiatan Plan Vivo diimplementasikan oleh kelompok petani dan masyarakat pedesaan di lahan mereka sendiri. Proyek-proyek ini dinilai berdasarkan Standar Plan Vivo dan diawasi secara mandiri oleh Plan Vivo Foundation.

Dalam proyek Plan Vivo, setiap peserta menyusun rencana pengelolaan lahan berkelanjutan yang dinamakan *plan vivo*¹. Melalui Plan Vivo, peserta menggabungkan kegiatan penggunaan lahan dan mata pencaharian yang ada dengan kegiatan dan praktik penggunaan lahan yang telah ditingkatkan.

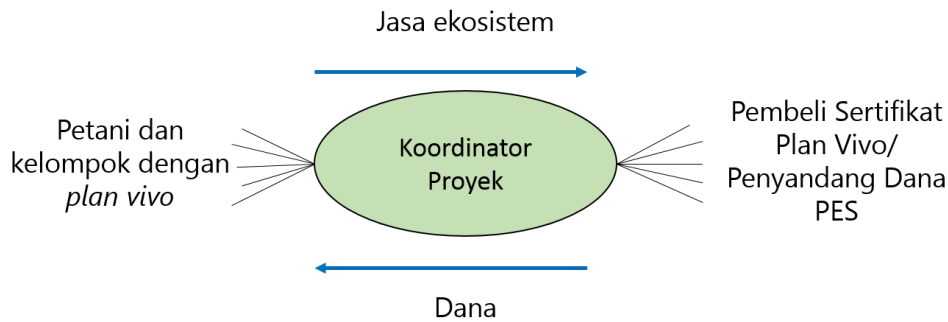
Kegiatan-kegiatan ini meliputi:

- Penghutan dan reboisasi (menggunakan spesies asli atau ternaturalisasi)
- Agroforestri (menanam pohon tumpang sari dengan tanaman lain)
- Restorasi atau rehabilitasi hutan² (mengembalikan struktur, produktivitas, dan keanekaragaman spesies dalam hutan yang masih ada atau mengembalikan produktivitas dan beberapa spesies yang awalnya ada, tetapi tidak semuanya)
- Mencegah deforestasi dan melestarikan hutan
- Kegiatan penggunaan lahan lain dengan manfaat karbon yang terkuantifikasi (contoh, sistem pertanian yang ditingkatkan)

Peserta memulai “kesepakatan PES” dengan koordinator proyek, setuju untuk melaksanakan *plan vivo* mereka untuk mendapatkan pembayaran jasa ekosistem secara bertahap. Pemantauan dilaksanakan oleh koordinator proyek dan pembayaran diserahkan kepada peserta yang memenuhi target yang disepakati. Jasa ekosistem biasanya diukur menggunakan karbon sebagai metriknya. Koordinator proyek mengumpulkan Jasa ekosistem dari peserta dan mentransaksikan jasa ekosistem tersebut kepada penyandang dana PES dengan melaksanakan penjualan Sertifikat Plan Vivo. Proses transaksi dirangkum dalam Gambar 1 di bawah ini.

¹ Nama “*plan vivo*” berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “rencana hidup”; Plan Vivo berasal dari proyek di Meksiko.

² Definisi IUCN: <http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/FR-IS-005.pdf>



Gambar 1: Melakukan transaksi Jasa ekosistem

1.1 Skema Pembayaran Jasa ekosistem

Dengan memulai kesepakatan dengan masyarakat untuk melaksanakan rencana pengelolaan lahan yang ditujukan untuk menghasilkan Jasa ekosistem (yang berarti pembayaran didasarkan pada kinerja), proyek Plan Vivo menggunakan metode “Pembayaran untuk Jasa ekosistem” atau PES (*Payments for Ecosystem Services*).

Jasa Penyediaan	Jasa Pendukung	Jasa Pengaturan	Jasa Kultural
<ul style="list-style-type: none"> • Pangan • Air • Bahan bakar • Serat • Biokimia • Sumberdaya genetik 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa yang dibutuhkan untuk memproduksi semua jasa ekosistem lainnya • Formasi tanah • Siklus nutrisi • Produksi primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat yang didapat dari pengaturan proses-proses ekosistem • Pengaturan iklim • Pengaturan penyakit • Pengaturan air • Penjernihan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat nonmateri yang didapat dari ekosistem • Spiritual dan religi • Rekreasi dan wisata • Estetika • Inspirasi • Citarasa tempat • Warisan budaya

Gambar 2: Jasa ekosistem didefinisikan oleh Millenium Ecosystems Assessment (2005)

Definisi yang luas untuk Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari ekosistem. Penilaian Ekosistem Milenium³ (*Millenium Ecoystems Assessment*) mengkategorikan jasa ekosistem ke dalam empat tipe: penyediaan (*provisioning*), pendukung (*supporting*), pengaturan (*regulating*), dan kultural (*cultural*) (lihat Gambar 2), bergantung pada jasa dan manfaat yang didapatkan masyarakat dari jasa ekosistemjasa tersebut.

Agar sesuai dengan skema PES, jasa ekosistem harus ditaksir lebih rendah, yang mengakibatkan timbulnya ancaman pada suplai jasa ekosistem tersebut. Selain itu, skema PES harus mampu mendapatkan sumber pendanaan, maka harus ada setidaknya satu pelaku yang bersedia untuk membayar jasa ekosistem tersebut. Jasa ekosistem yang paling umum ditransaksikan melalui skema PES adalah penyerapan (*sequestration*) dan penyimpanan karbon (pengaturan iklim), konservasi keanekaragaman hayati, jasa daerah aliran sungai/DAS, dan keindahan alam untuk rekreasi dan pariwisata.

Fitur penting kesepakatan PES adalah:

³ Tersedia di: www.millenniumassessment.org

- a) Transaksi bersifat sukarela
- b) Jasa ekosistem atau penggunaan lahan dirancang untuk memastikan jasa tersebut dibayar
- c) Oleh satu atau lebih pembeli jasa
- d) Dari satu atau lebih penyedia jasa
- e) Hanya jika penyedia jasa terus menunjukkan kinerja baik (model berdasarkan hasil)

Skema PES sangat bervariasi dikarenakan konteks dan tujuan proyek yang berbeda-beda. **Tidak ada bentuk standar kaku untuk proyek Plan Vivo.** Terlepas dari persyaratan yang dicantumkan di Standar Plan Vivo, model ini fleksibel dan proyek-proyeknya mengembangkan sistem yang relevan di tingkat lokal. Tabel 1 merangkum elemen-elemen yang berhubungan dengan semua proyek Plan Vivo dan variasinya.

Terlepas dari fleksibilitasnya, pengalaman yang didapatkan dari proyek-proyek Plan Vivo sejak 1990-an menghasilkan banyak pelajaran penting. Proyek-proyek baru didorong untuk dimulai berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Manual ini berisi contoh dan pelajaran dari pengalaman proyek sampai saat ini. Manual ini akan diperbarui dari waktu ke waktu untuk mencerminkan pengalaman terbaru.

1.2 Kenapa Karbon? Menggunakan karbon sebagai metrik untuk PES

Dalam proyek Plan Vivo, karbon adalah metrik dominan untuk pemantauan, pembayaran, dan pendanaan karena:

- **Kemudahan kuantifikasi:** Dibandingkan dengan jasa ekosistem seperti perlindungan DAS dan stabilitas tanah, **karbon relatif mudah untuk dikuantifikasi dan dipantau** dari waktu ke waktu dan ini merupakan cara yang relatif adil untuk mendistribusikan dana di antara peserta⁴. Oleh karena itu, mewakili unit yang efisien untuk digunakan dalam skema PES.
- **Kesediaan untuk membayar:** Telah dikembangkan pasar dan mekanisme pendanaan lain yang memungkinkan kesediaan untuk membayar menggunakan kuantifikasi dan penyerahan jasa karbon (atau jasa iklim). Bahkan ketika pemberi dana ingin mendukung kegiatan untuk alasan bukan sekadar karbon atau bahkan tidak terkait dengan karbon, pembayaran sejumlah (ton) penyediaan jasa karbon tertentu dapat menjadi dasar transaksi dan mendorong transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana, dan menyediakan cara untuk pemantauan kinerja dan penyediaan jasa.
- **Indikator manfaat ekosistem yang lebih luas:** Ketika kegiatan dirancang dengan sensitif, contohnya menggunakan spesies asli, penyediaan jasa karbon di ekosistem terrestrial (berbasis lahan) adalah indikator kuat penyediaan beragam jasa dan perlindungan keanekaragaman hayati.

⁴ Dengan beberapa kualifikasi: misalnya, proyek mungkin akan membangun insentif tambahan untuk spesies yang lambat tumbuh dengan manfaat karbon yang lebih rendah. Pembayaran tidak harus selalu berhubungan langsung dengan karbon, tetapi karbon menawarkan basis yang baik untuk memulai.

Tabel 1: Elemen dan variasi umum dalam proyek Plan Vivo

Aspek	Fitur/prinsip inti	Variasi
Kegiatan	Proyek mendukung masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan untuk karbon, mata pencaharian, dan manfaat ekosistem.	Kegiatan penggunaan lahan bergantung pada konteks proyek, contohnya, petani menanam tegakan pohon dan kebun buah di plot individual atau kelompok dengan rencana pengelolaan hutan untuk hutan kemasyarakatan
Peserta	Petani dan kelompok masyarakat merancang rencana pengelolaan lahan (<i>plan vivo</i>) untuk lahan mereka sendiri	Tipe peserta bergantung pada bagaimana lahan dimiliki dan dikelola di wilayah proyek, contohnya proyek penanaman pohon terutama menargetkan petani. ATAU proyek konservasi hutan utamanya melibatkan kelompok pengguna hutan.
Mekanisme pembayaran	Peserta menerima pembayaran terkait kinerja secara bertahap melalui mekanisme yang transparan	Bagaimana pendanaan mencapai masyarakat bergantung pada konteks pendanaan lokal, contohnya hanya pembayaran tunai/dalam bentuk barang yang mungkin dilakukan. ATAU pembayaran dapat dilakukan melalui lembaga mikrofinansial lokal.
Penetapan koordinasi proyek	Struktur kelembagaan yang jelas dengan kemampuan untuk memobilisasi dan mendukung masyarakat	Tidak ada ketentuan penetapan kelembagaan. Suatu proyek dapat dikoordinasikan oleh satu LSM yang melakukan semua fungsi atau beberapa organisasi yang berbagi fungsi.
Tujuan mata pencaharian dan ekosistem	Semua proyek bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk melindungi dan memulihkan ekosistem	Tujuan spesifik bergantung pada konteks proyek, contohnya proyek menargetkan restorasi bakau, ATAU proyek bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui produksi HHBK.
Sumber pendanaan	Pendanaan diperlukan untuk pengembangan proyek dan keberlanjutan PES, koordinasi dan verifikasi proyek.	Proyek mungkin menggunakan satu atau kombinasi beragam sumber pendanaan (pasar dan bukan pasar), contohnya, hanya pendanaan karbon sukarela DAN/ATAU bagian dari skema pendanaan nasional yang dibiayai publik atau program adaptasi internasional.
Ukuran (jumlah peserta dan wilayah)	Proyek biasanya menciptakan sistem yang dapat direplikasi di mana peserta dapat bergabung seiring berjalannya waktu (pendekatan lanskap).	Tidak ada ukuran minimum atau maksimum, walaupun proyek seringkali berupa kegiatan percontohan dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, contohnya dari sejumlah kecil peserta yang mengelola lahan kurang dari 100 hektar, hingga ribuan peserta di beberapa wilayah.



2 Mengkoordinasikan proyek Plan Vivo (kerangka kerja kelembagaan)

Tata kelola yang baik dan adaptif serta jenjang tanggung jawab yang jelas adalah kunci keberhasilan jangka panjang sebuah proyek Plan Vivo. Skema PES, terutama ketika melibatkan banyak pembeli/penyandang dana dan pengguna lahan, membutuhkan lembaga perantara dengan struktur kelembagaan yang jelas, kemampuan pencatatan yang baik dan transparan, dan fungsi dukungan masyarakat jangka panjang.

Tabel 2: Wilayah fungsional program Plan Vivo yang menunjukkan perbedaan fungsi koordinasi dan pengelolaan yang dilakukan

Tema	Fungsi
Administratif, finansial, hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan <i>plan vivo</i>, kesepakatan PES, hasil pemantauan • Mengelola keuangan proyek dan melaksanakan pembayaran (PES) • Mengelola Sertifikat Plan Vivo di register Plan Vivo • Melapor kepada Plan Vivo Foundation • Mengkoordinasikan audit proyek, yaitu validasi, verifikasi
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang kegiatan penggunaan lahan dengan masyarakat dan membuat kuantifikasi jasa karbon dari kegiatan • Membantu pengembangan dan mengevaluasi <i>plan vivo</i> yang dilakukan oleh peserta • Pemantauan kemajuan peserta • Menyediakan dukungan dan pelatihan penyuluhan teknis • Mengumpulkan data sesuai kebutuhan (misalnya data pertumbuhan di plot percontohan)
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan saran pemilihan masyarakat target (misalnya menganalisis kapasitas lokal, mengidentifikasi konflik atau isu lokal); • Membantu peserta dalam menyediakan bukti hak atas tanah; • Melaksanakan lokakarya dengan kelompok-kelompok, membahas dan mengkomunikasikan persyaratan proyek • Membantu kelompok memilih perwakilan untuk berhubungan dengan proyek; • Memberikan saran untuk masalah seperti mobilisasi, pembayaran • Memfasilitasi penyelesaian masalah atau konflik

2.1 Koordinator proyek

Fungsi koordinasi dilaksanakan oleh “koordinator proyek”, baik organisasi yang telah ada atau organisasi yang didirikan khusus untuk mengelola proyek. Skema PES dapat lebih mudah

ditetapkan dan diterapkan lebih cepat dan hemat biaya **ketika lembaga yang telah ada dapat melaksanakan peran koordinator** dengan pengalaman yang relevan, misalnya dengan masyarakat target, dan program pengembangan masyarakat dan penggunaan lahan, atau pengalaman mengelola keuangan proyek dan melakukan pembayaran kepada masyarakat.

Jika tidak ada organisasi yang layak, pendirian lembaga perantara harus melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan. Para pengembang skema PES harus mempertimbangkan bagaimana beragam pemangku kepentingan dapat diwakili di dalam lembaga perantara, misalnya melalui keanggotaan, pembagian saham, atau dewan direksi.

Mungkin yang paling efektif adalah jika ketiga fungsi dapat dilaksanakan oleh satu organisasi. Namun, pembentukan **Dana Perwalian mandiri** mungkin akan menguntungkan dalam hal transparansi finansial untuk mengamankan dana yang disimpan di antara periode penjualan karbon dan pembayaran kepada produsen. Semua proyek Plan Vivo disyaratkan untuk menunjukkan bagaimana dana PES dialokasikan dan diamankan. Menetapkan dana perwalian (atau yang sebanding di tingkat lokal) dengan pengawasan mandiri dapat menjadi cara yang efektif untuk memenuhi persyaratan ini.

Tujuan jangka panjang proyek Plan Vivo dapat mencakup pendirian kantor pusat tingkat regional untuk mendukung kegiatan PES yang meliputi wilayah luas, misalnya di seluruh provinsi atau bahkan negara. Kerangka kerja kelembagaan suatu proyek dapat berubah dari waktu ke waktu, terutama ketika proyek berkembang. Organisasi-organisasi baru dapat terlibat ketika proyek berkembang ke wilayah lain, misalnya untuk mengkoordinasikan pelatihan dan pemantauan jika mereka telah berada di wilayah tersebut.

2.2 Bagaimana pejabat pemerintah dapat terlibat?

Sejauh mana dukungan pemerintah atau legislatif dibutuhkan untuk proyek Plan Vivo akan bergantung pada wilayah proyek dan skala skema yang direncanakan. Skema lokal akan mungkin dijalankan dengan izin, keterlibatan, atau dukungan pemerintah yang sangat minim. Kemampuan sebuah skema untuk meningkat dan potensi untuk menetapkan sebuah skema nasional akan bergantung pada atau akan difasilitasi oleh kesediaan pemerintah untuk mengintervensi dan, pada akhirnya, bahkan menyediakan peraturan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Contoh bagaimana pejabat pemerintah dapat terlibat:

- Bibit bersumber dari persemaian milik pemerintah
- Pelatihan awal dan pertemuan serta dukungan penyuluhan yang berkelanjutan
- Membantu dalam masalah administratif dan hukum, seperti menetapkan penguasaan lahan
- Menghubungkan proyek dengan proyek atau kegiatan pemerintah lain yang memungkinkan efisiensi atau berbagi pelajaran yang didapatkan

2.3 Mencari bantuan eksternal

Proyek Plan Vivo mungkin membutuhkan bantuan eksternal untuk mengembangkan aspek-aspek di dalam proyek, terutama fungsi teknis. Seringkali bantuan eksternal dibutuhkan untuk kegiatan perancangan proyek awal yang meliputi:

- Mengembangkan pemodelan karbon dan spesifikasi teknis.
- Membantu persiapan dokumen proyek seperti PDD.
- Memberikan bantuan di dalam pertemuan pelatihan masyarakat, termasuk menjelaskan konsep PES/karbon kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lokal lainnya.
- Meningkatkan kapasitas organisasi lokal untuk fungsi pengelolaan proyek secara umum.

Dukungan eksternal dapat diakses melalui:

- Konsultan (Plan Vivo Foundation dapat memberikan saran jika diperlukan, tapi proyek bebas untuk mencari saran eksternal lain dari sumber apa pun yang mereka pilih)
- Lembaga penelitian atau universitas
- Badan/dinas pemerintah.

Individu atau lembaga eksternal yang memberikan bantuan harus memiliki tujuan mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada staf proyek sehingga bantuan eksternal dapat dikurangi secara bertahap ketika proyek dapat meningkatkan kapasitasnya.

Lembaga penelitian, universitas atau organisasi kehutanan/pertanian lokal kemungkinan besar dapat memberikan masukan berharga selama periode pengembangan proyek, terutama untuk mengakses data atau saran tentang pemilihan kegiatan dan melakukan kuantifikasi jasa karbon, seperti:

- Survei biomassa serta metode dan data pemodelan karbon;
- Informasi lain mengenai kecenderungan penggunaan lahan;
- Informasi mengenai penggunaan dan ketersediaan spesies yang tepat;
- Memberikan saran terkait masalah teknis atau strategi pengelolaan tertentu.

Para pelaku ini dapat juga memainkan peran fungsi teknis, seperti dukungan penyuluhan, pemantauan atau fungsi lain, seperti survei keanekaragaman hayati.



3 Mengidentifikasi dan melibatkan masyarakat target

Kelompok target adalah kelompok yang diajukan oleh proyek untuk mendapatkan manfaat melalui pelibatan mereka dalam perencanaan penggunaan lahan. Contohnya, proyek dapat menargetkan koperasi tani di wilayah tertentu atau masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan yang terancam. Program Plan Vivo biasanya melaksanakan kegiatan percontohan dengan kelompok awal dan memulai kegiatan ketika kapasitasnya terbangun dan sumber daya termobilisasi.

Direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan percontohan dengan kelompok yang telah memiliki **kapasitas untuk memobilisasi dan mengorganisir** anggotanya. Kelompok ini kemungkinan besar akan lebih bisa berpartisipasi secara efektif dalam pelatihan dan perencanaan.

Melibatkan kelompok target membutuhkan pengetahuan mengenai latar belakang sosioekonomi dan lingkungan setempat. Jika koordinator proyek belum pernah bekerja sama dengan masyarakat di daerah tersebut, mereka sebaiknya mempertimbangkan untuk menjalin kemitraan dengan organisasi berbasis masyarakat lokal atau mempekerjakan penilai sosial lokal untuk membantu dalam mengadakan lokakarya dan pelatihan awal.

Pertanyaan berikut harus dipertimbangkan:

1. Apakah ada kelompok yang sudah terbentuk (misalnya kelompok perempuan, koperasi tani) yang dapat digunakan proyek untuk memobilisasi peserta? Temuan proyek Plan Vivo terkini menunjukkan model yang sukses adalah dengan menargetkan kelompok perempuan.
2. Apakah anggota kelompok mampu memberikan bukti penguasaan lahan yang stabil?
3. Apakah ada peraturan atau tradisi lokal yang dapat mempengaruhi partisipasi, misalnya apakah perempuan dapat berpartisipasi?
4. Semudah apa komunikasi efektif dilakukan di wilayah tersebut (kemudahan akses, tingkat keterpencilan wilayah)?
5. Apakah kelompok memiliki pengalaman teknis, misalnya kegiatan pembibitan, pengelolaan hutan?
6. Seefektif apa kelompok dalam mencapai keputusan bersama (hal ini penting ketika kegiatan akan diimplementasikan di lahan masyarakat)?
7. Apakah ada perselisihan atau konflik yang dapat mempengaruhi atau mengganggu kegiatan?
8. Apakah ada sarana lokal untuk pembayaran (misalnya lembaga mikrofinansial)?

3.1 Menetapkan penguasaan lahan

Penguasaan lahan yang stabil merupakan persyaratan penting untuk berpartisipasi di proyek Plan Vivo mengingat petani atau kelompok yang berpartisipasi harus dapat menunjukkan bahwa mereka berhak untuk mentransaksikan jasa ekosistem, membuat keputusan dan menerapkan kegiatan penggunaan lahan jangka panjang.

Jika mungkin, penguasaan lahan harus ditunjukkan melalui penyediaan sertifikat tanah atau dokumen hukum lain yang sepadan. Namun, dalam banyak kasus di negara berkembang, penguasaan lahan di wilayah pedesaan tidak dapat ditunjukkan secara langsung dan mungkin tidak ada dokumen resmi terkait penguasaan lahan. Yang mungkin ada adalah sistem alokasi lahan tradisional di antara masyarakat setempat yang menggunakan pengetahuan lokal.

Jika tidak ada dokumen resmi, proyek harus mengembangkan metode yang relevan di tingkat lokal untuk memeriksa keberadaan dan stabilitas hak penggunaan lahan para peserta proyek. Ini mungkin meliputi, contohnya dalam sistem tradisional, meminta pimpinan daerah yang relevan dan pemilik lahan yang berada di sekitar tanah peserta untuk melengkapi kesepakatan *plan vivo* dan/atau PES. Sistem ini dapat mencegah masalah atau kebingungan di masa depan terkait kepemilikan jasa karbon.

Pengembang proyek memiliki peran penting untuk membina hubungan antara masyarakat dan pemerintah di wilayah yang masyarakatnya mengelola lahan milik pemerintah dan terutama jika sebelumnya tidak ada kesepakatan tertulis.

Koordinator proyek mungkin diperlukan untuk mendukung proses seperti:

- Menyusun **nota kesepahaman (MoU)** mengenai pengelolaan hutan partisipatif antara pihak berwenang dan struktur tingkat masyarakat. MoU ini harus mengklarifikasi peran dan tanggung jawab bersama, termasuk apakah ada pembayaran yang jatuh tempo kepada pihak berwenang terkait pemasukan hutan, dan mencantumkan kerangka waktu yang jelas. Jika mungkin, kerangka waktu harus berhubungan dengan kegiatan pengelolaan bersiklus agar tidak menciptakan insentif yang tidak tepat. Misalnya jika masyarakat memiliki kesepakatan hak guna hutan selama 5 tahun, tapi butuh 10 tahun untuk mencapai pemasukan yang layak, maka masyarakat akan kekurangan insentif untuk membuat rencana secara efektif.
- Menyiapkan **kode etik lokal** atau panduan penggunaan sumber daya alam. Jika mungkin, buku pegangan dengan ilustrasi sebaiknya disusun dalam bahasa lokal.

Meminta **kejelasan kepada pemerintah mengenai peraturan** yang mungkin tidak sengaja berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mentransaksikan Jasa ekosistem. Contohnya, di beberapa negara berkembang, pemilik tanah pribadi memiliki tanah dan produk yang mereka hasilkan, tapi kepemilikan ini hanya berlaku "di atas tanah". Pemerintah tetap berhak atas sumber daya bawah tanah, kemungkinan dimaksudkan untuk mengatur hak akan sumber daya, seperti minyak dan mineral. Namun, tidak jelas bagaimana peraturan ini dapat diterjemahkan ketika masyarakat menerima pembayaran untuk jasa karbon di bawah permukaan tanah, seperti karbon dari akar atau tanah.

3.2 Menjelaskan Plan Vivo dan PES kepada masyarakat

Partisipasi dalam Plan Vivo selalu bersifat sukarela berdasarkan pada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan/padiatapa (*Free prior and informed consent/FPIC*).

Pertemuan awal masyarakat kemungkinan besar menggabungkan tujuan-tujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai potensi proyek Plan Vivo dan melakukan analisis kepentingan, serta mengumpulkan informasi mengenai masyarakat dan lokasi potensial. Sebelum ke lapangan, mitra



Gambar 3: Pertemuan pengenalan Plan Vivo dengan komite desa di Senegal



proyek harus membahas tujuan-tujuan ini kemudian menyusun kerangka pendekatan dan agenda pertemuan masyarakat.

Kelompok Target harus diberikan kesempatan untuk menghadiri sesi pelatihan kelompok yang mencakup tema berikut ini:

- Apa itu perubahan iklim dan bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi masyarakat dan mata pencaharian lokal;
- Manfaat praktik penggunaan lahan alternatif dan pemanfaatan spesies asli;
- Konsep penyediaan jasa karbon;
- Standar Plan Vivo dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi.

Hal penting yang harus ditekankan pada pertemuan awal adalah:

- Partisipasi dalam proyek bersifat sukarela;
- Partisipasi tidak berakhir dengan transfer kepemilikan lahan produsen;
- Kesepakatan bersifat komitmen jangka panjang.

Mitra proyek dapat menetapkan beberapa aturan dasar pelaksanaan pertemuan untuk memastikan pesan tersampaikan secara konsisten, yang mencakup beberapa di antaranya:

- **Siapa yang menyampaikan pesan:** Ketika tim proyek melibatkan mitra lokal dan eksternal, yang sebaiknya memimpin diskusi adalah mitra proyek lokal karena mereka dikenali oleh masyarakat.
- **Manajemen harapan, termasuk cara menyebutkan uang/pembayaran:** Pembayaran terkait kinerja sangat penting dalam menjelaskan model PES dan Plan Vivo, maka hal tersebut seharusnya dijelaskan, tetapi pada tahap awal perancangan proyek, detail pembayaran kemungkinan besar tidak dapat diketahui. Mitra proyek harus mempertimbangkan dari awal cara menangani harapan terkait tingkat pembayaran.
- **Cara memastikan keterlibatan dan partisipasi:** Mitra proyek kemungkinan dari awal harus mempertimbangkan metode untuk memastikan beragam kelompok, contohnya kelompok perempuan, berkesempatan menyuarakan pendapatnya. Metode ini akan bergantung pada konteks dan budaya lokal. Sebagai contoh, pembentukan kelompok diskusi kecil yang terpisah setelah presentasi awal mungkin akan lebih efektif; memungkinkan para perempuan membentuk kelompok terpisah untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi secara lebih bebas.

Catatan pertemuan harus dibuat (juga daftar hadir peserta) dan direkam untuk keperluan di masa mendatang, dalam rangka mengembangkan strategi penanganan masalah yang serupa, dan menyediakan bukti konsultasi kepada auditor partisipasi masyarakat.

Proyek sebaiknya menyusun lembar fakta sederhana berisikan tujuan utama, aturan, dan proses proyek untuk digunakan dalam pelatihan dan diberikan kepada masyarakat, termasuk informasi cara berhubungan dengan perwakilan proyek.

Dokumen penunjang:
Format Standar Agenda Pertemuan Masyarakat

3.3 Melibatkan dan menginformasikan pemangku kepentingan lain (nonpeserta)

Perencanaan proyek awal juga harus melibatkan pemangku kepentingan proyek yang relevan, contohnya pemerintah setempat dan pejabat kehutanan, untuk menginformasikan rencana proyek kepada mereka, dan membangun hubungan yang dapat mendukung pengembangan proyek di masa mendatang. Koordinator proyek harus memastikan proyek mematuhi aturan daerah, nasional, dan internasional sebelum menerapkan kegiatan.

Pemangku kepentingan utama yang diinformasikan dan diajak konsultasi dapat mencakup:

- Pelaku pemerintah (pusat, provinsi, dan daerah)
- Titik fokus perubahan iklim (*Climate Change Focal Point*) regional atau nasional

- Dewan perwakilan di pedesaan atau badan tingkat lokal
- LSM lain yang bekerja di wilayah proyek atau dengan masyarakat target terkait kegiatan pengembangan lingkungan dan sosial.

Tujuan pertemuan awal dapat meliputi:

- Membuka saluran komunikasi dan menginformasikan pemangku kepentingan mengenai proyek. Di beberapa kasus, hal ini mungkin merupakan bagian dari persyaratan hukum.
- Mengumpulkan informasi mengenai wilayah proyek dan masyarakat (misalnya informasi hak tanah, peraturan dan tradisi yang dapat diterapkan, prosedur tata kelola lokal)
- Mengumpulkan informasi mengenai inisiatif penanaman pohon atau pengelolaan sumber daya alam lain di wilayah tersebut.

Memahami bagaimana kegiatan pemangku kepentingan dapat saling tumpang tindih, melengkapi, atau bertentangan dengan kegiatan proyek yang diusulkan dan pemanfaatan terbaik sumber daya, serta potensi kolaborasi atau kemitraan untuk memanfaatkan sumber daya dengan sangat baik dan jaringan dukungan yang ada. Kewenangan kehutanan lokal, contohnya, dapat mendukung kegiatan proyek dari perspektif sumber daya dan pelatihan.



4 Memilih dan merancang kegiatan proyek

Kegiatan Plan Vivo selalu dirancang berdasarkan konsultasi dengan masyarakat target untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal. Ini memastikan kegiatan proyek cocok dengan kondisi lokal di wilayah target dan meningkatkan kemungkinan hasil proyek akan dihargai dan jasa ekosistem akan dihasilkan dalam jangka panjang. Satu proyek Plan Vivo dapat meliputi serangkaian kegiatan yang berbeda yang membahas masalah yang berbeda, dan kegiatan dapat ditambahkan seiring dengan waktu.

Ini melibatkan pertemuan dengan masyarakat di tahap awal pengembangan proyek dan mengunjungi wilayah proyek potensial dengan perwakilan masyarakat. Selain berkonsultasi dengan masyarakat, tim proyek harus menilai kelayakan implementasi kegiatan potensial di wilayah yang diajukan melalui pengumpulan informasi yang ada mengenai:

- Sistem pertanian yang berlaku dan **penggunaan lahan yang khas** di masyarakat
- **Kegiatan ekonomi** lain yang relevan seperti kedekatan ke pasar
- **Spesies pohon mana yang asli** di wilayah tersebut dan secara khusus spesies mana yang memiliki **pertumbuhan yang baik** atau beragam manfaat, contohnya untuk kayu dan buah.

Informasi tersebut tersedia dari:

- Pengetahuan lokal
- Lembaga penelitian atau universitas lokal
- Dinas pemerintahan dan survei regional/nasional
- Proyek penggunaan lahan lain di wilayah tersebut

Hal yang dibahas dengan masyarakat dalam pemilihan kegiatan harus meliputi:

- Kecocokan kegiatan dengan mempertimbangkan mata pencaharian dan kebutuhan energi
- Potensi kegiatan untuk menghasilkan jasa karbon
- Faktor yang membatasi, seperti infrastruktur, penguasaan lahan, keahlian teknis, dll.
- Produk yang saat ini kelompok atau individual hasilkan atau ingin hasilkan (misalnya kayu, kopi, buah, madu) dan akan mampu menghasilkan pendapatan
- Sumber daya (lahan, tenaga kerja dan modal) yang akan diperlukan, misalnya pagar untuk melindungi dari ternak. Apakah mungkin menggunakan pilihan pagar hidup (menggunakan spesies yang tidak dimakan hewan ternak) atau parit?
- Ketersediaan bibit untuk sistem penanaman
- Pertimbangan ekologis: ketersediaan air, keberadaan rayap.



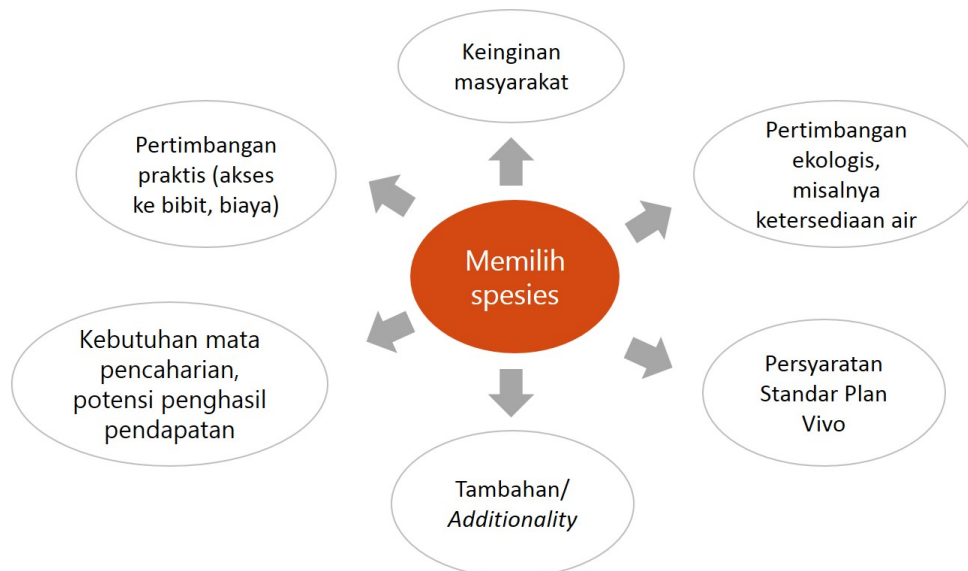
Gambar 4: Memulihkan hutan pinus-ek di Meksiko (kiri) dan menanam bibit mangga dan jeruk di Malawi (kanan)

4.1 Pemilihan spesies

Masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pemilihan spesies untuk kegiatan penanaman dan harus memiliki kesempatan untuk mengajukan spesies yang menarik bagi mereka. Sertifikat Plan Vivo hanya dapat dihasilkan dari penanaman spesies pohon asli atau yang ternaturalisasi. Sebelum membahas pemilihan spesies dengan masyarakat, koordinator proyek harus mempertimbangkan cara mengajukan pemilihan spesies dan apakah ada spesies yang tidak masuk pertimbangan.

Yang harus dipertimbangkan meliputi:

- Cara memastikan **keberagaman** spesies dalam proyek
- Apakah **spesies yang jumlahnya berkurang** dapat dijadikan target, yaitu relevansi status konservasi
- Pentingnya **aspek-aspek praktis**, seperti ketersediaan bibit dan pagar
- Keinginan untuk mengidentifikasi spesies yang **pernah** ditanam masyarakat
- Pentingnya memilih spesies yang memiliki **nilai kegunaan** (misalnya pengikat nitrogen di tempat yang masyarakatnya tidak memiliki akses cukup ke pupuk)
- **Dukungan penyuluhan lokal** yang tersedia untuk mendukung kegiatan
- Bagaimana penggunaan spesies tersebut akan melengkapi dan menambah inisiatif pengelolaan sumber daya alam lain di wilayah tersebut.



Gambar 5: Faktor yang mempengaruhi pemilihan spesies

Contoh proyekMemilih spesies di Senegal:

Masyarakat di wilayah ini telah menerima dukungan signifikan dan memiliki banyak pengalaman menanam **mangga dan kacang mede**. Ini mengarah pada kesepakatan bahwa proyek terutama harus mencakup penanaman spesies asli dan harus dikomunikasikan kepada masyarakat di awal. Jika tidak, masyarakat akan berfokus pada kedua spesies tersebut dan pengumpulan informasi mengenai spesies asli akan kurang berhasil. Juga ditetapkan untuk sementara waktu bahwa mangga dan kacang mede harus dikecualikan dari fase awal proyek, karena menanam spesies tersebut telah menjadi praktik umum, sehingga akan memiliki **dampak tambahan yang rendah** yang berhubungan dengan produksi jasa ekosistem.

Kelompok diskusi masyarakat mampu mengidentifikasi beberapa spesies asli yang berpotensi untuk dimasukkan ke proyek. Spesies yang berbeda diidentifikasi dalam kelompok pria dan wanita. Kelompok diskusi wanita cenderung berfokus pada spesies asli yang dapat menjadi sumber makanan dan obat.

Sumber tambahan

Basis data *World Agroforestry Centre Agroforestry*:

Basis data ini menyediakan informasi mengenai spesies pohon agroforestri untuk membantu pekerja lapangan dan peneliti memilih spesies yang cocok untuk sistem agroforestri. Basis data ini mencantumkan informasi tiap spesies terkait identitas, ekologi dan distribusi, propagasi dan pengelolaan, manfaat fungsional, hama dan penyakit.

<http://www.worldagroforestry.org/resources/databases/agroforestry>



5 Pemilihan lokasi

5.1 Berapa banyak lokasi?

Skala partisipasi awal dapat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Pendanaan yang tersedia untuk kesepakatan pembayaran jasa ekosistem (PES).
- Pengalaman koordinator proyek memenuhi beragam fungsi.
- Tingkat dukungan awal masyarakat dan pemahaman proyek.
- Jumlah lahan yang tersedia untuk kegiatan proyek.

Kegiatan percontohan dan peningkatan level secara bertahap adalah cara efektif untuk menguji rancangan proyek dan memitigasi risiko, menyediakan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah sejak awal dan menyesuaikan prosedur, dan membangun dukungan masyarakat. Disarankan untuk melaksanakan tahap percobaan di tingkat yang lebih rendah apabila koordinator proyek adalah organisasi baru atau hanya memiliki sedikit pengalaman dalam mendukung masyarakat terkait perencanaan penggunaan lahan atau administrasi dana. Gambar 6 menjelaskan contoh bagaimana program Plan Vivo berkembang seiring waktu, ketika program telah meningkatkan kapasitas dalam pemasaran sertifikat Plan Vivo dan memenuhi fungsi koordinasi.

5.2 Menetapkan kriteria pemilihan lokasi

Proyek harus mempertimbangkan untuk mengembangkan kriteria atau prinsip panduan untuk mengidentifikasi lokasi target. Hal ini kemungkinan untuk mencerminkan atau bertumpang tindih dengan bagaimana masyarakat target diidentifikasi. Disarankan, sama halnya dengan pemilihan kelompok target, untuk memulai dari wilayah dengan tantangan implementasi yang lebih sedikit untuk menguji sistem sebelum melanjutkan ke wilayah yang lebih sulit. Contohnya, proyek dapat dimulai di wilayah dengan ketersediaan air yang lebih banyak atau lebih dekat dengan usaha pembibitan, dan kemudian diperluas; atau mulai dari wilayah dengan penguasaan lahan yang jelas sebelum menangani wilayah dengan isu yang lebih rumit.

Kriteria pemilihan lokasi dapat meliputi:

- Kejelasan dan stabilitas penguasaan lahan
- Ketersediaan lahan untuk kegiatan
- Ketersediaan dan akses ke air
- Kesiapan untuk terlibat dalam kegiatan Plan Vivo
- Kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan berfungsi, misalnya kelompok perempuan
- Pengalaman pengelolaan hutan/penanaman pohon masyarakat setempat
- Adanya hambatan lokal, seperti rayap, tanah tidak subur, salinisasi
- Untuk penanaman, adanya pembibitan pohon/tersedianyanya bibit secara lokal
- Ketercakupan – lokasi mana yang dapat memastikan keterwakilan beragam kelompok, misalnya suku bangsa?
- Batasan administratif/ketercakupan lembaga pedesaan
- Lokasi berhubungan dengan wilayah terlindungi (misalnya jika tujuan proyek adalah untuk mengurangi tekanan pada wilayah terlindungi) atau daerah dengan Nilai Konservasi Tinggi.

- Ukuran, keterpencilan, dan potensi skalabilitas – ketercakupan lokasi yang lebih besar atau terkonsentrasi dapat membantu mengurangi biaya transaksi.



Gambar 6: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi

Contoh proyek I Memilih lokasi di Senegal

Empat lokasi percontohan dipilih untuk mengujicoba kegiatan penghutanan dan agroforestri Plan Vivo dengan masyarakat di Senegal menggunakan proses sebagai berikut:

Tim proyek mengunjungi 14 lokasi potensial (desa atau kelompok desa kecil) di dalam radius 2 km Hutan Patako. Kriteria pemilihan lokasi dibahas sebelum dan setelahnya. Prinsip yang digunakan adalah lokasi yang dipilih harus memiliki “kesempatan untuk berhasil”. Setelah kunjungan dan diskusi dengan masyarakat, tim mengidentifikasi dan mempertimbangkan tujuh kriteria penting untuk lokasi awal, yang digunakan untuk menilai dan memberikan peringkat untuk tiap lokasi:

- Ketersediaan lahan penanaman pohon (0-10 poin)
- Ketersediaan dan akses ke air (0-10 poin)
- Kedekatan jarak ke Hutan Patako (0-5 poin)
- Kesiapan terlibat dalam kegiatan Plan Vivo (0-10 poin)
- Keberadaan organisasi wanita (0-5 poin)
- Kesiapan untuk membuat lahan tersedia bagi kelompok wanita (0-10 poin)
- Pengalaman lokal menanam pohon (0-8 poin)
- Adanya hambatan lokal (0-5 poin)

Hambatan lokal yang teridentifikasi adalah masalah ekologis yang meliputi rayap, tanah tidak subur, kualitas dan ketersediaan air, dan salinisasi. Kebanyakan keluarga di wilayah ini memiliki tanah dengan penguasaan tanah yang stabil. Keterlibatan Komisi Pengelolaan Penguasaan Tanah (badan terdesentralisasi yang mendaftarkan transfer tanah) dibahas sebagai proses potensial untuk memastikan keamanan penguasaan tanah.

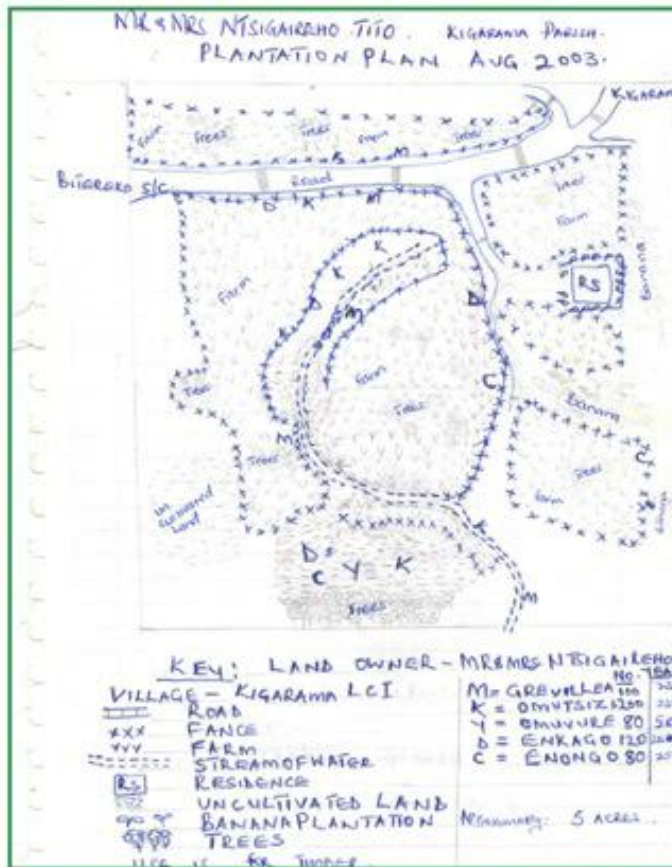
Berdasarkan skor, lokasi yang ada di peringkat atas kemudian diperiksa untuk memastikan:

- Ketercakupan kelompok etnis – apakah kelompok etnis yang berbeda terwakili
- Lokasi percontohan mencakup kedua perwakilan pedesaan di wilayah tersebut
- Lokasi percontohan tidak terlalu terkonsentrasi
- Setidaknya satu lokasi memiliki potensi baik untuk berkembang

Alat dan dokumen yang mendukung:

Jaringan Sumber Daya Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Network*) – informasi dan saran tentang bagaimana menggunakan konsep NKT dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk mengidentifikasi NKT yang ada di wilayah terkait, mengelola dan mempertahankan NKT yang didukungnya, dan memantau wilayah NKT untuk memastikan praktik pengelolaan yang efektif.

<http://www.hcvnetwork.org/resources>



Gambar 7: Contoh Plan Vivo untuk reforestasi dengan spesies campuran, Uganda.

Plan vivo harus menunjukkan batas-batas lahan peserta. Di dalam batas wilayah tersebut harus ditunjukkan wilayah intervensi proyek (agroforestri) dan indikasi penggunaan lahan lain di wilayah lahan selebihnya.

Semua penggunaan lahan harus ditandai secara langsung atau menggunakan legenda agar perubahan dapat dilacak seiring waktu – misalnya dari pertanian ke agroforestri.

Hal terpenting adalah *plan vivo* menunjukkan penggunaan lahan di sekitar kegiatan *Plan Vivo*, termasuk di dalam wilayah pengelolaan peserta, selain menunjukkan di mana kegiatan *Plan Vivo* akan berlangsung. Ini memungkinkan pemantauan dampak penggunaan lahan yang lebih luas di wilayah tersebut, untuk memastikan jasa karbon yang dihasilkan oleh kegiatan *Plan Vivo* tidak tercampur di wilayah pengelolaan lain, misalnya karena perpindahan kegiatan pertanian (kebocoran).

6.2 Mengevaluasi *plan vivo*

Setiap *plan vivo* harus dinilai oleh koordinator proyek sebelum dijadikan dasar kesepakatan PES untuk **memastikan kelayakan lingkungan, ekonomi dan sosialnya**.

Evaluasi *plan vivo* meliputi pemeriksaan:

- Semua informasi yang diperlukan tersedia dan mencerminkan kondisi lapangan;
- Kegiatan yang diajukan jelas dan konsisten dengan spesifikasi teknis proyek yang disetujui (misalnya spesies yang tepat dan jarak kegiatan penanaman, rencana ekstraksi yang diizinkan untuk kegiatan konservasi);
- Kegiatan yang cocok untuk lahan dan kebutuhan mata pencaharian peserta;
- Implementasi kegiatan yang diajukan tidak akan mengurangi produksi pertanian keseluruhan lebih rendah dari tingkat yang berkelanjutan.

Syarat yang terakhir penting untuk memastikan peserta memiliki cukup tanah untuk memenuhi kebutuhan mereka setelah implementasi kegiatan proyek. Hal ini penting tidak hanya untuk memastikan *plan vivo* mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan, tapi juga memastikan bahwa rencana penanaman pohon atau perlindungan hutan yang terlalu ambisius tidak akan mengarah ke perpindahan kegiatan dan hilangnya stok karbon di wilayah lain (kebocoran/*leakage*).



7 Mengembangkan Mekanisme Pembayaran

Sebelum memulai kesepakatan transaksi jasa ekosistem dari masyarakat, proyek harus menetapkan struktur finansial dan administratif yang menyediakan dasar hukum yang sesuai untuk transaksi karbon dan mengamankan dana masyarakat dalam jangka panjang.

7.1 Persyaratan kelembagaan: dana Plan Vivo

Koordinator proyek bertanggung jawab untuk mengatur Dana Plan Vivo yang mendapatkan pendanaan PES dari penyandang dana, misalnya pembeli Sertifikat Plan Vivo, dan menyimpan dana tersebut dalam dana perwalian hingga peserta harus menerima pembayaran.

Struktur hukum spesifik untuk Dana Plan Vivo akan bergantung pada konteks hukum dan perbankan nasional. LSM nirlaba atau badan amal harus membuat rekening bank terpisah yang diperuntukkan hanya untuk Plan Vivo, sementara perusahaan komersial harus membuat dana perwalian (atau yang sepadan di konteks lokal) dengan pemantauan mandiri.

Pertimbangan yang diambil mencakup:

- **Transparansi dan akuntabilitas:** alokasi dana PES harus terjaga dengan memastikan dana tersebut terlindungi dan administrasi pembayaran bersifat transparan. Koordinator proyek bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melindungi dana.
- **Kemudahan akses** dan administrasi: seberapa mudah koordinator proyek dapat mengakses dana dan melakukan banyak pembayaran (misalnya di proyek petani)?
- **Stabilitas mata uang:** proyek harus menetapkan dana PES menggunakan mata uang yang stabil.

Contoh Proyek, Scolel'te, Meksiko

Dana Plan Vivo di proyek ini adalah Fondo BioClimático (FBC), badan nonkorporat yang diatur oleh undang-undang perbankan Meksiko. Dana ini tidak memiliki karbon atau uang yang disetorkan oleh pembeli, tetapi menyimpan sumber daya tersebut dalam dana perwalian hingga persyaratan terpenuhi dan target pemantauan tercapai. Sejumlah porsi dana digunakan untuk menutupi biaya teknis dan administratif proyek.

Bagaimana dana mencapai masyarakat akan bergantung terutama pada sarana yang tersedia di tingkat lokal dan preferensi masyarakat setempat. Mekanisme pembayaran harus selalu terlebih dahulu disetujui oleh masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membahas beragam mekanisme dan saluran pendanaan. Masyarakat dengan akses

minim ke lembaga keuangan, contohnya, mungkin ingin mendapatkan pelatihan, materi, atau dukungan lain yang menggantikan pembayaran uang tunai. Insentif non-tunai atau pendekatan gabungan mungkin akan lebih cocok di tingkat lokal karena beragam alasan. Kemungkinan masyarakat bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dalam bentuk dukungan untuk usaha mikro atau inisiatif lain, terutama untuk proyek konservasi hutan yang mengutamakan pengembangan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi emisi dari deforestasi.

Jika fasilitas perbankan tidak tersedia, mungkin ada lembaga lain, seperti lembaga mikrofinansial yang dapat digunakan untuk mentransfer dana secara transparan. Proyek harus mempertimbangkan risiko pembayaran tunai (misalnya risiko untuk staf proyek), dan manfaat pembayaran melalui lembaga, seperti mendorong perencanaan finansial dan memanfaatkan lembaga finansial lokal.

Contoh Proyek: Mendistribusikan dana di Uganda melalui saluran yang ada

Dalam proyek *Trees for Global Benefits* di Uganda, petani dibantu untuk membuka rekening di bank koperasi lokal dan lembaga mikrofinansial, yang telah membantu proyek untuk menetapkan mekanisme pembayaran yang transparan dan juga menghasilkan dampak positif sampingan untuk masyarakat yang lebih luas. Pembayaran karbon telah membantu pemanfaatan lembaga finansial lokal dan memperbaiki ketersediaan pinjaman mikro di wilayah tersebut. Kehadiran perwakilan proyek lokal yang terpercaya di wilayah proyek menjadi kunci untuk memastikan mekanisme pembayaran berfungsi dengan baik dan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masalah apapun kepada koordinator proyek.

Dana masyarakat dibuat sebagai bagian dari mekanisme pembayaran pada 2009, enam tahun setelah proyek dimulai untuk memenuhi permintaan masyarakat. Ketika membahas risiko proyek, para peserta memutuskan jika seseorang kehilangan pohon bukan karena kesalahan pribadi, contohnya karena banjir atau kebakaran, mereka harus dapat mengakses dana untuk penanaman kembali. Para peserta juga ingin mengumpulkan sumber daya untuk investasi material, seperti gergaji. Ini mengarahkan mereka pada kesepakatan 10% dari total pembayaran masing-masing peserta akan disetorkan ke Dana Karbon Masyarakat.



7.2 Prinsip pembagian manfaat

• Antara masyarakat dan koordinator proyek

Mayoritas keuntungan dari penjualan jasa ekosistem dalam proyek Plan Vivo harus dikumpulkan untuk masyarakat yang menyediakan jasa ekosistem tersebut, idealnya 60% atau lebih. Saldo ini dapat digunakan untuk menutupi biaya administrasi, pemantauan, verifikasi, sertifikasi proyek, dan biaya implementasi dan pengelolaan proyek lain.

- **Di dalam masyarakat (untuk kasus *plan vivo* kelompok)**

Untuk *plan vivo* kelompok, beragam individu dan kelompok akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kegiatan proyek dan kemungkinan akan ada variasi tingkat masukan, biaya, dan tanggung jawab. Contohnya, sebuah *plan vivo* untuk wilayah hutan dapat menggabungkan kegiatan-kegiatan seperti peternakan lebah oleh kelompok pertama, patroli oleh kelompok kedua, dan pertanian yang ditingkatkan oleh kelompok ketiga.

Masyarakat, dengan bantuan dari koordinator proyek, harus menyepakati cara pembagian dana PES atau manfaat lain. Koordinator proyek kemungkinan bertindak sebagai fasilitator dalam diskusi ini, tapi pada akhirnya masyarakatlah yang harus membuat keputusan. Kesepakatan pembagian manfaat harus mempertimbangkan tingkat masukan setiap kelompok, sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan, dan apa yang dianggap adil dan layak oleh kelompok itu sendiri. Koordinator proyek juga harus mempertimbangkan bagaimana kesepakatan pembagian manfaat mencakup kelompok marginal, seperti perempuan, petani yang tidak memiliki tanah, atau etnis minoritas.

Contoh proyek | Pembagian manfaat untuk memaksimalkan pelibatan dan manfaat iklim

Himalayan Community Carbon Project/Proyek Karbon Komunitas Himalaya di Nepal mengembangkan sistem alokasi lahan yang disetujui masyarakat lokal di dalam hutan kemasyarakatan untuk memastikan rumah tangga miskin yang tidak memiliki tanah menerima manfaat. Pertama, rumah tangga dikategorisasikan berdasarkan kekayaan (misalnya miskin, sangat miskin) menggunakan indikator yang sederhana dan berdasarkan konteks lokal (misalnya kepemilikan tanah, jumlah sumber pendapatan). Kedua, rumah tangga termiskin diberikan alokasi lahan di wilayah hutan kemasyarakatan untuk digunakan secara produktif (misalnya produksi kapulaga). Manfaat utama pendekatan ini terkait karbon komunitas adalah kegiatan ini membuat wilayah-wilayah lahan kecil dikelola secara berkelanjutan, yang tidak akan terjadi jika tidak ada kegiatan ini. Misalnya, tersedianya potensi manfaat karbon tambahan yang mapan dengan melibatkan pengguna hutan paling miskin di dalam kerangka proyek yang lebih luas.

- **Dengan organisasi pihak ketiga, misalnya badan pemerintah**

Prioritas dalam proyek Plan Vivo harus memenuhi kewajiban pemberian insentif kepada masyarakat dan pembiayaan pengelolaan proyek. Namun, organisasi pihak ketiga dapat berperan di dalam proyek yang mengharuskan mereka dilibatkan dalam pembagian manfaat. Contohnya, jika kegiatan proyek berlangsung di lahan negara di mana masyarakat memiliki hak guna, pemerintah dapat menerima pembayaran karena terlibat dalam pengelolaan hutan, atau melaksanakan penyuluhan atau pemantauan. Tingkat pembayaran yang sesuai untuk badan/pejabat pemerintah harus didasarkan pada tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan proyek, seperti perencanaan partisipatif dan peningkatan kapasitas masyarakat, pemantauan, patroli, dll., dan sejauh mana sumber daya tambahan diperlukan untuk memenuhi perannya(atau melaksanakan peran yang ada dengan lebih baik).

7.3 Berapa harga yang seharusnya diterima masyarakat untuk satu ton CO₂?

Beragam faktor akan mempengaruhi tingkat pembayaran yang disepakati dengan masyarakat:

- Ketika proyek terutama didanai melalui penjualan Sertifikat Plan Vivo, pertimbangan utamanya adalah pembeli seperti apakah yang bersedia membayar jasa karbon dan seberapa besar porsi dana yang dibutuhkan koordinator proyek untuk beroperasi.
- Tingkat yang diajukan harus mampu memberikan insentif bagi kegiatan yang diajukan, dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan lokal dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan, serta ekspektasi masyarakat. Ini bukan ilmu

pasti dan akan melibatkan banyak diskusi dengan masyarakat yang terlibat dan membutuhkan pengetahuan lokal yang cukup.

7.4 Kesepakatan PES (membuat kontrak untuk jasa ekosistem)

Membayar pengelola lahan dan kelompok masyarakat untuk jasa ekosistem yang mereka hasilkan mengharuskan adanya kesepakatan di antara entitas yang membayar jasa ekosistem tersebut (koordinator proyek) dan individu atau kelompok yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan atau melindungi jasa ekosistem tersebut. Ini dapat disebut sebagai “kesepakatan jasa” atau “kesepakatan PES”.

Dalam proyek Plan Vivo, koordinator proyek menandatangani kesepakatan PES (atau “kesepakatan penjualan”, “kontrak jasa ekosistem”, dll.) dengan petani individual dan/atau kelompok masyarakat, bergantung pada tingkat lahan yang dikelola. Kesepakatan PES dalam proyek Plan Vivo pada dasarnya merupakan kontrak yang dibuat antara koordinator proyek dan setiap petani atau kelompok masyarakat terkait dengan satu *plan vivo* yang spesifik.

Kesepakatan PES menyatakan peserta proyek bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengelola kegiatan. Kesepakatan ini juga menyatakan koordinator proyek bertanggung jawab memantau kegiatan, melakukan pembayaran, dan menyediakan dukungan yang sesuai kepada masyarakat.

Kesepakatan PES harus selalu mencakup informasi berikut ini:

- Nama petani atau kelompok, termasuk kontak utama yang diberikan kewenangan untuk mewakili kelompok menandatangani kesepakatan
- Rujukan *plan vivo* yang menjadi dasar kesepakatan (nomor ID dan lokasi, idealnya dengan koordinat GPS)
- Informasi apapun mengenai penguasaan lahan yang dibutuhkan sebagai bagian dari prosedur proyek
- Jumlah jasa karbon (tCO₂e) yang dibayarkan
- Jumlah pembayaran dan jadwalnya (interval)
- Persyaratan pembayaran atau penanda perkembangan (yaitu target pemantauan)
- Untuk *plan vivo* kelompok: rangkuman detail pembagian manfaat yang relevan yang disepakati para peserta
- Mekanisme pembayaran, misalnya detail rekening bank
- Tanggal penandatanganan *dan* implementasi kegiatan

Dokumen pendukung:

Contoh kesepakatan PES – lihat Lampiran 1

Penting untuk diingat oleh koordinator proyek, penyangga karbon harus dikurangi dari jasa karbon terhitung (10-30% jasa karbon yang disediakan tiap peserta tidak dapat dijual dan jumlah ini membentuk cadangan karbon yang dinamakan “penyangga risiko” (*risk buffer*) untuk melindungi proyek dari hilangnya stok karbon secara tak terduga).

7.5 Apakah pemicu penandatanganan kesepakatan PES?

Penandatanganan kesepakatan PES untuk satu *plan vivo* tertentu oleh koordinator proyek dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang bergantung pada faktor berikut:

- Ketersediaan pembeli dan/atau investasi proyek awal
- Jika tidak ada pembeli jasa karbon di awal, kemampuan koordinator proyek untuk bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran dan menangani atau menanggung biaya koordinasi proyek
- Kapasitas koordinator proyek untuk memenuhi fungsi pemantauan, administrasi, dan dukungan terkait penandatanganan sejumlah kesepakatan PES.

Jika ingin berpartisipasi dalam proyek, petani atau kelompok masyarakat harus memenuhi persyaratan dasar partisipasi dalam Standar Plan Vivo. Mereka harus mempunyai kepemilikan lahan atau hak guna lahan yang stabil dan berjangka panjang, dan bersedia untuk melaksanakan kegiatan Plan Vivo dan memulai kesepakatan jangka panjang.

Di luar persyaratan dasar tersebut, proyek mungkin harus mengembangkan persyaratan kelayakannya sendiri atau proses penyaringan lainnya untuk menentukan peserta mana yang mendapatkan prioritas. Proyek Plan Vivo kemungkinan akan memiliki dana atau kapasitas tak terbatas untuk memulai kesepakatan PES dengan petani atau kelompok yang tertarik dengan wilayah proyek. Peserta pertama di dalam kelompok target mungkin adalah orang-orang pertama yang menyerahkan rencana pengelolaan (*plan vivo*), sesuai asas 'yang pertama datang yang pertama dilayani'.

Mengalokasikan penjualan di dalam proyek merupakan tanggung jawab koordinator proyek. Ini membutuhkan tingkat pengetahuan lokal yang cukup, karena akan melibatkan penilaian kelompok dan masyarakat mana yang paling siap untuk memasuki Sistem Plan Vivo. Yang harus dipertimbangkan adalah beragam faktor yang dijelaskan di manual ini ketika memilih masyarakat dan lokasi target.

Contoh: Sebuah komunitas masyarakat memiliki *plan vivo* dengan manfaat karbon sebanyak 20.000 tCO₂.

Skenario A: Koordinator proyek tidak menandatangani kesepakatan penjualan hingga mereka menjual di muka seluruh 20.000 tCO₂ kepada pembeli. Setelah proyek menjual 20.000 tCO₂ tersebut, koordinator dapat memulai kesepakatan penjualan dengan masyarakat untuk total jumlah tersebut. Harga yang disepakati dengan masyarakat diinformasikan lewat harga penjualan.

Skenario B: Koordinator proyek tidak menjual di muka semua (atau satu pun) jasa karbon, tapi tetap membuat kesepakatan penjualan dengan masyarakat untuk total 20.000 tCO₂. Ini berarti koordinator proyek mengambil risiko untuk melakukan pembayaran dan pemantauan sepanjang kesepakatan penjualan sebelum mendapatkan pendanaan karbon untuk menutupi pembayaran tersebut.

Plan Vivo Foundation menyarankan koordinator proyek hanya mengambil risiko ini ketika mereka memiliki kapasitas pemasaran untuk menjual jasa karbon yang disebutkan atau memiliki sumber daya untuk menangani sementara kewajiban pembayaran dan pemantauan. Sertifikat Plan Vivo hanya akan dikeluarkan ketika proyek dapat menunjukkan kapasitas ini.



8 Manajemen informasi

Proyek Plan Vivo membutuhkan sistem administrasi dan pengelolaan data yang baik untuk mencatat dan melacak informasi dan dokumen proyek, termasuk:

- *Plan vivo*
- Kesepakatan PES
- Administrasi pembayaran kepada produsen
- Hasil pemantauan termasuk detail tindakan koreksi
- Catatan dan hasil pertemuan masyarakat

Proyek dapat menggunakan sistem mereka sendiri atau menggunakan basis data Plan Vivo standar yang dikembangkan untuk kegiatan penanaman pohon. Basis data ini memungkinkan data untuk disusun dan ditinjau ulang dengan mudah, dan dirancang untuk menghasilkan laporan tahunan yang harus diserahkan kepada Plan Vivo Foundation.

Dalam basis data Plan Vivo:

- Setiap peserta mendapatkan nomor identitas yang dihasilkan secara otomatis.
- Jasa karbon setiap *plan vivo* dapat dihasilkan secara otomatis dengan memasukkan angka dari spesifikasi teknis di awal (ketika jasa karbon dikuantifikasi berdasarkan per hektar)

Koordinator proyek dapat membuat beragam laporan, misalnya untuk mengetahui produsen mana yang pembayarannya jatuh tempo atau berapa banyak produsen yang tidak berhasil melakukan pemantauan beserta alasannya.

Alat penunjang:

Basis data Plan Vivo (Microsoft Access File)

Tersedia sesuai permintaan ke Plan Vivo Foundation



9 Memantau dampak selain karbon

Panduan memantau dampak karbon dalam proyek Plan Vivo dapat dibaca di materi panduan teknis.

Pemantauan dampak sosial dan lingkungan “nonkarbon” suatu proyek harus dilakukan untuk kesuksesan jangka panjang dan keberlangsungan proyek. Kegiatan yang meningkatkan keanekaragaman hayati lokal atau menghasilkan jasa ekosistem lainnya, seperti konservasi air dan tanah, dapat lebih meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan di wilayah pedesaan. Kegiatan yang menyediakan manfaat sosial kemungkinan besar akan ditanamkan di masyarakat dan menghasilkan perubahan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan dampak iklim yang bertahan lama.

Proyek yang dapat mendemonstrasikan dan menghitung dampak positif sosioekonomi dan lingkungan terkait dengan dan selain karbon kemungkinan juga akan menarik bagi penyandang dana PES.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak sosioekonomi dapat ditemukan di dokumen berikut.

Dokumen pendukung:

Manual Keanekaragaman Hayati & Sosioekonomi Plan Vivo (Plan Vivo Socio-economic & Biodiversity Manual)

www.planvivo.org/project-network/project-resources/

9.1 Memantau dampak ekosistem

Kegiatan Plan Vivo dirancang untuk menghasilkan jasa ekosistem selain karbon, terutama melalui pemanfaatan spesies asli dan ternaturalisasi dalam sistem penanaman. Karbon dipakai sebagai metrik untuk mengindikasikan penghasilan jasa ekosistem. Pemantauan jasa ekosistem nonkarbon secara langsung, seperti manfaat air, tanah, dan keanekaragaman hayati seringkali terbukti sulit. Oleh karena itu, kuantifikasi manfaat tersebut dan menghubungkannya dengan kegiatan proyek akan sulit juga untuk dilakukan.

Namun, sejumlah pendekatan dan perangkat tersedia untuk membantu proyek memantau jasa ekosistem selain karbon, terutama memantau perubahan keanekaragaman hayati. Beberapa sumber daya dicantumkan dalam kotak di bawah ini. Proyek harus mencari cara untuk mengadaptasikan metode ke kondisi dan tujuan mereka dan mengembangkan indikator

yang relevan di tingkat lokal berdasarkan konsultasi dengan masyarakat setiap kali memungkinkan.

Terkait pelaksanaan praktik yang baik, pada tahap awal koordinator proyek juga harus menghubungi lembaga penelitian atau organisasi lokal lain yang relevan, termasuk program penggunaan lahan lain untuk mempelajari apakah ada program pemantauan atau survei data yang dapat diikuti atau dapat digunakan oleh proyek.

Alat dan dokumen pendukung:

Landscape Measures Resource Centre: kumpulan sumber daya dan studi kasus mengenai analisis tingkat lanskap terkait program konservasi dan mata pencaharian pedesaan

<http://landscapemeasures.info/>

High Conservation Value Resource Network:

<http://www.hcvnetwork.org/resources>

9.2 Melibatkan masyarakat dalam pemantauan

Proyek didorong untuk merekrut teknisi komunitas dari masyarakat setempat seiring dengan waktu dan memberikan pelatihan untuk pendelegasian tanggung jawab pemantauan.

Ketika kegiatan pemantauan didelegasikan kepada masyarakat, prosedur dan prinsip berikut harus dijalankan:

- Pelatihan tentang tata cara pengukuran lapangan yang penting secara akurat diberikan kepada setiap teknisi komunitas;
- Ketika teknisi komunitas berpartisipasi dalam proyek dan bertanggung jawab di bawah kesepakatan PES, mereka tidak memantau kegiatan mereka sendiri;
- Masyarakat memahami sepenuhnya dan menyetujui pembayaran atau insentif apa pun yang mereka terima untuk berpartisipasi dalam pemantauan;
- Dibuat daftar teknisi komunitas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemantauan dan pelatihan yang telah mereka terima (penting untuk verifikasi).
- Ada proses evaluasi berkala internal untuk kinerja dan akurasi pemantauan masyarakat (misalnya 10% sampel kerja teknisi komunitas diverifikasi per tahun).

LAMPIRAN 1: CONTOH KESEPAKATAN PES

KESEPAKATAN PES PLAN VIVO
[NAMA PROYEK]

Pembukaan

Kesepakatan ini dibuat pada [tanggal] antara [koordinator proyek] bertempat di [alamat] dan [peserta/grup] bertempat di [alamat]. Tujuannya adalah menyediakan persyaratan penjualan jasa ekosistem di bawah Proyek Plan Vivo, [nama proyek].

Menimbang [koordinator proyek] telah menyepakati pembelian jasa ekosistem dari peserta di bawah Proyek Plan Vivo dengan harga dan persyaratan yang dijelaskan di bawah ini;

Menimbang Peserta [adalah pemilik/yang memiliki hak guna jangka panjang] sebidang tanah yang dijelaskan di Tabel A kesepakatan ini dan telah mendaftarkan nomor Plan Vivo [xxxx] terlampir di Lampiran terkait sebidang tanah yang sama, yang telah dievaluasi dan disetujui oleh [koordinator proyek] untuk diimplementasikan di bawah Proyek Plan Vivo.

Kesepakatan

1. Kesepakatan ini berlaku selama periode yang dijelaskan di Tabel B.

[Koordinator proyek] menyetujui untuk:

Melaksanakan pemantauan lahan peserta selama periode tertentu dan berdasarkan target yang dijelaskan di Tabel B dan berdasarkan pada prosedur yang dijelaskan secara spesifik dalam manual proyek.

Pembayaran yang disetujui, dijelaskan dalam Tabel A, akan dibayarkan kepada peserta oleh koordinator proyek dalam bentuk cicilan yang dijelaskan dalam Tabel B, ketika hasil pemantauan menunjukkan target rujukan telah terpenuhi.

Peserta setuju untuk:

Menerapkan kegiatan (dirangkum dalam Tabel C) dan melaksanakan kegiatan pengelolaan seperti yang dijelaskan dalam plan vivo mereka dan menerapkan tindakan koreksi apapun yang disarankan selama proses pemantauan.

Memasukkan [persentase] manfaat karbon terhitung mereka dalam penyangga risiko karbon yang dikelola oleh [koordinator proyek].

Tidak membuat kesepakatan penjualan jasa ekosistem/karbon apapun dengan pihak lain terkait dengan plan vivo yang sama dan kegiatannya yang terkait.

Menginformasikan koordinator proyek mengenai situasi apapun yang menghambat mereka untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan apapun dalam plan vivo mereka.

Tabel A: Detail Plan Vivo

Peserta (sebutkan secara spesifik apakah itu kelompok/individual, jika kelompok, sebutkan perwakilannya)	
Lokasi	
Nomor Identifikasi Plan Vivo	
Total Manfaat Karbon (tCO ₂)	
Penyangga (x%)	
Manfaat karbon total yang memenuhi persyaratan pembayaran (total minus penyangga)	
Harga (misalnya \$/ tCO ₂) jika dapat dipakai	
Total pembayaran (\$)	
Detail rekening/pembayaran lain	

Tabel B: Kegiatan (dapat dimodifikasi untuk kegiatan spesifik sesuai kebutuhan, misalnya penanaman atau pencegahan deforestasi)

Kegiatan (dan spesifikasi teknis yang dipakai)	Wilayah (Ha)	Spesies (jika dapat diterapkan)	Tanggal implementasi yang diajukan

[Proyek dapat mencatat informasi lain yang merupakan variabel dalam spesifikasi teknis, seperti tujuan pengelolaan atau periode rotasi]

Tabel C: Jadwal Pemantauan (contoh untuk kegiatan penanaman pohon)

Waktu (tahun setelah tanggal implementasi)	Target Pemantauan	Persentase total pembayaran jatuh tempo (%)	Pembayaran (US\$)
0	50% plot dibangun	30	
1	100% plot dibangun	20	
3	Tingkat bertahan hidup tidak kurang dari 85%	20	
5	Rata-rata diameter batang (DBH) tidak kurang dari 10 cm	10	
10	Rata-rata DBH tidak kurang dari 20 cm	20	

Peserta:

Tanda tangan:

Nama:

Tanggal:

.....

.....

.....

Koordinator Proyek:

Tanda tangan:

Nama:

Tanggal:

.....

.....

.....

Daftar Istilah

Adaptasi – Inisiatif dan tindakan untuk mengurangi kerentanan sistem alam dan manusia terhadap efek perubahan iklim sebenarnya dan yang diduga (definisi IPCC).

Aforestasi (*Afforestation*) – Konversi langsung oleh manusia pada lahan yang belum pernah berhutan selama setidaknya 50 tahun menjadi wilayah berhutan.

Agroforestri – Menanam pohon dan tanaman lain di lahan yang sama.

Baseline – Titik rujukan awal yang dapat dijadikan ukuran untuk jasa karbon dari kegiatan penggunaan lahan proyek (juga dirujuk sebagai ‘tanpa skenario proyek’). Baseline meliputi analisis stok karbon sebelum intervensi proyek dan bagaimana kemungkinan perubahan stok karbon selama tidak ada proyek.

Batasan proyek – Wilayah yang ditandai untuk penerapan spesifikasi teknis dalam proyek.

CO₂ – (Karbon dioksida) Gas yang ada secara alami dan dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak atau biomassa, atau perubahan penggunaan lahan dan proses industri. CO₂ adalah gas rumah kaca antropogenik utama yang mempengaruhi keseimbangan radiatif bumi.

Deforestasi – Konversi langsung oleh manusia akan lahan berhutan menjadi penggunaan lahan lain atau pengurangan jangka panjang tutupan kanopi pohon di bawah batas minimum 10%.

Ekosistem – Komunitas tanaman dan hewan (termasuk manusia) yang berinteraksi dengan satu sama lain dan lingkungan mereka.

GRK (Gas Rumah Kaca) – Enam gas yang dijelaskan dalam Protokol Kyoto yang berkontribusi pada perubahan iklim: karbon dioksida, hidrofluorokarbon, metana, nitrous oksida, perfluorokarbon, dan sulfur-heksafluorida. Gas-gas ini berkontribusi kepada efek rumah kaca.

Hutan – Wilayah lahan lebih dari 0,5 ha dengan tutupan kanopi pohon lebih dari 10% yang utamanya bukan pertanian atau penggunaan lahan nonhutan spesifik lainnya. Dalam kasus hutan muda atau daerah di mana pertumbuhan pohon terhambat secara iklim, pohon-pohon tersebut harus dapat mencapai ketinggian 2 m di habitatnya (Protokol Kyoto).

IUCN – International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam).

Jasa ekosistem – Jasa ekosistem, dalam definisi luasnya, adalah manfaat yang didapatkan manusia dari ekosistem. Di dalam proyek Plan Vivo, Jasa ekosistem adalah dampak lingkungan positif dari kegiatan proyek termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon (pengaturan iklim), konservasi keanekaragaman hayati, jasa DAS, dan keindahan alam untuk rekreasi dan pariwisata.

Kebocoran (*Leakage*) – Perubahan stok karbon yang tidak disengaja (biasanya dianggap negatif walaupun kebocoran positif dapat terjadi) di luar batasan proyek yang merupakan hasil langsung dari kegiatan proyek. Perubahan ini mungkin merupakan peningkatan emisi atau penurunan penyerapan karbon, yang menghasilkan manfaat karbon yang lebih rendah dari proyek.

Kegiatan penggunaan lahan – Intervensi proyek menyeluruh, misalnya konservasi hutan, aforestasi, agroforestri, pengelolaan padang rumput, yang menghasilkan jasa ekosistem.

Kesepakatan PES – Kontrak yang dibuat antara koordinator proyek dan setiap petani atau kelompok komunitas terkait dengan satu plan vivo spesifik, yang berfungsi untuk mentransaksikan jasa ekosistem dan menetapkan tanggung jawab pembayaran dan pemantauan.

Koordinator proyek – Organisasi yang menjalankan tanggung jawab keseluruhan pengelolaan proyek Plan Vivo.

Mitigasi – Implementasi kegiatan atau kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan/atau meningkatkan resor karbon/penyerapan karbon.

Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*) – Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi merupakan wilayah penting di lanskap yang harus dikelola dengan baik untuk mempertahankan atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi.

PDD (*Project Design Document/Dokumen Desain Proyek*) – PDD mengumpulkan semua informasi proyek, termasuk struktur dan proses tata kelola.

Penggunaan Lahan Berkelanjutan – Penggunaan lahan yang direncanakan, konsisten dengan pemenuhan persyaratan mata pencaharian, perlindungan tanah, aliran air dan keanekaragaman hayati.

Penghitungan ganda (*Double Counting*) – Mengukur atau menjual unit jasa karbon lebih dari sekali.

Penyangga risiko (*Risk Buffer*) – Cadangan jasa karbon yang dihasilkan dari kegiatan penggunaan lahan tapi tidak dapat dijual sebagai Sertifikat Plan Vivo, untuk melindungi proyek dari kehilangan cadangan karbon yang tak terduga.

Penyerapan Karbon (*Carbon Sequestration*) – Penghilangan karbon dioksida secara langsung dari atmosfer melalui perubahan penggunaan lahan, aforestasi reforestasi, dan/atau peningkatan karbon tanah (hanya penyerapan biologis).

Periode Kredit – Jangka waktu jasa karbon dihitung.

Periode proyek – Jangka waktu koordinator proyek berkomitmen untuk mendukung dan memantau kegiatan proyek.

Perubahan iklim – Perubahan iklim yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia (UNFCCC Pasal 1).

PES – *Payments for Ecosystem Services* (Pembayaran Jasa Ekosistem).

Petani (*Smallholder*) – Pemilik lahan yang tidak bergantung sepenuhnya pada buruh permanen dan mengelola lahan mereka terutama oleh mereka sendiri dan anggota keluarga.

plan vivo – Rencana pengelolaan lahan berkelanjutan untuk sebidang lahan yang disusun oleh pemilik lahan (petani atau kelompok masyarakat).

Proyek Plan Vivo – Proyek yang telah diregistrasikan di Plan Vivo Foundation berdasarkan validasi bahwa proyek ini secara sukses mengimplementasikan dan mengembangkan sistem yang diperlukan untuk menyediakan jasa ekosistem terkuantifikasi dan mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan.

Reforestasi – Konversi langsung oleh manusia atas lahan tidak berhutan menjadi berhutan di lahan yang sebelumnya berhutan tetapi telah dikonversi menjadi lahan tidak berhutan.

Rehabilitasi (ekosistem) – Proses mengembalikan produktivitas dan beberapa, tapi tidak semua, spesies tanaman dan hewan yang pada awalnya berada di dalam ekosistem.

Restorasi (ekosistem) – Proses mengembalikan struktur, produktivitas, dan keanekaragaman spesies di dalam hutan yang sebelumnya ada.

Sertifikat Plan Vivo – Sertifikat jasa ekosistem yang dihasilkan oleh proyek Plan Vivo, secara mandiri dikeluarkan oleh Plan Vivo Foundation. Setiap Sertifikat Plan Vivo mewakili pengurangan/reduksi atau pencegahan satu ton emisi karbon dioksida, ditambah manfaat mata pencaharian dan ekosistem terkait.

Spesies Asli – Spesies yang berada dan hidup di wilayah secara alami tanpa bantuan yang disengaja dari manusia atau akan ada jika tidak hilang akibat pengelolaan lahan di masa lalu.

Spesies yang Ternaturalisasi – Spesies bukan asli yang bereproduksi secara konsisten dan mempertahankan jumlah populasinya selama lebih dari satu siklus hidup tanpa intervensi langsung dari manusia.

Spesifikasi Teknis – Bagian PDD yang menjelaskan kegiatan penggunaan lahan spesifik untuk dilaksanakan dalam proyek Plan Vivo, termasuk metodologi yang digunakan untuk mengkuantifikasi jasa karbon, analisis risiko, kebocoran dan tambahan/additionality, sistem pengelolaan dan pemantauan yang akan diadopsi, dan deskripsi jasa ekosistem selain karbon.

Tambahan (*Additionality*) – Kegiatan penggunaan lahan yang merupakan kegiatan tambahan, jika tidak dapat atau kemungkinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya intervensi dan dukungan dari proyek.

Tampungan Karbon (*Carbon Pool*) – Sistem yang dapat menyimpan dan/atau mengakumulasi karbon, misalnya biomassa di atas tanah, serasah, kayu mati, dan karbon organik tanah.

Tanggal awal proyek – Tanggal diterapkannya kegiatan di kelompok awal plan vivo (rencana pengelolaan) di dalam proyek.

Validasi – Evaluasi awal proyek berdasarkan Standar Plan Vivo, dilaksanakan oleh peninjau ahli atau auditor terakreditasi yang disetujui.

Verifikasi – Evaluasi proyek pasca registrasi berdasarkan Standar Plan Vivo, oleh pemeriksa dari pihak ketiga yang disetujui, untuk memastikan proyek selalu mengikuti Standar Plan Vivo dan kemajuan atau capaian dalam menghasilkan jasa ekosistem.

Wilayah proyek – Wilayah lahan yang menjadi lokasi kegiatan proyek yang dirancang untuk menyediakan jasa ekosistem. Wilayah proyek dapat merupakan satu wilayah lahan atau gabungan beberapa wilayah lahan kecil di dalam satu lanskap.

